



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 23 TAHUN 2004.

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Unit Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 17 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
5. Unit Pelaksana Teknis adalah pelaksana sebagian tugas Dinas Pendidikan yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan.
6. Unit Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

7. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disebut Kepala Unit adalah Kepala Unit Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pendidikan Kecamatan.
- (2) Nama dan wilayah kerja Unit Pendidikan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Unit Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.

Pasal 4

Unit Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Unit Pendidikan Kecamatan terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pendidikan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas pokok mengelola sebagian kegiatan pendidikan, pemuda, olahraga dan kesenian pada wilayah kerjanya agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan.

Pasal 7

Uraian tugas Kepala Unit sebagai berikut:

- a. memberikan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis pengelolaan pendidikan dasar sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
- b. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Unit Pendidikan Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan kebijakan teknis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Pendidikan Non Formal, pembinaan pemuda olah raga dan kesenian dalam wilayah kerjanya guna optimalisasi pelayanan;
- e. membimbing, membina, dan mengawasi PAUD, SD, Pendidikan Non Formal, pembinaan pemuda olah raga dan kesenian dalam wilayah kerjanya guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di bidang pendidikan;
- f. memberikan rekomendasi perubahan akreditasi, pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan PAUD, SD dan Pendidikan Non Formal yang dikelola oleh swasta atau masyarakat;
- g. melaksanakan pengelolaan pendapatan sesuai bidang tugasnya guna efisiensi dan efektivitas kegiatan;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian personil tenaga edukatif dan non edukatif pada PAUD, SD serta kelompok jabatan fungsional guna efisiensi dan efektivitas pembinaan pegawai;

- i. memberikan rekomendasi mutasi dan promosi jabatan bagi tenaga edukatif dan non edukatif pada PAUD, SD serta kelompok jabatan fungsional guna efisiensi dan efektivitas pembinaan pegawai;
- j. memberikan rekomendasi permintaan izin menjadi anggota partai politik, perangkat desa, alih status, pengangkatan kembali, promosi dan mutasi bagi tenaga edukatif dan non edukatif pada PAUD dan SD sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan atasan;
- k. mengendalikan urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja Unit Pendidikan Kecamatan;
- l. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data pendidikan dasar, pemuda, olah raga dan kesenian sebagai bahan analisis kebijakan;
- m. memberikan informasi kebijakan teknis PAUD, SD, pemuda, olah raga dan kesenian guna meningkatkan pemahaman;
- n. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- o. melaporkan kegiatan Unit Pendidikan Kecamatan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Unit Pendidikan Kecamatan.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagai berikut :

- a. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Urusan Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Unit Pendidikan Kecamatan;
- d. memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- e. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Unit Pendidikan Kecamatan agar digunakan sesuai kebutuhan;
- f. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventaris Unit Pendidikan Kecamatan guna mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi dan upaya tindak lanjut;
- g. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- h. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyampaikan informasi kebijakan teknis Unit Pendidikan Kecamatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- k. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- l. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Urusan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Unit Pendidikan Kecamatan sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 11

Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit, Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

- (1) Pimpinan satuan organisasi pada Unit Pendidikan Kecamatan wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugasnya;

- (2) Pimpinan satuan organisasi pada Unit Pendidikan Kecamatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pendidikan Kecamatan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Urusan Tata Usaha menyusun laporan berkala Unit Pendidikan Kecamatan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan Sub-sub Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto
pada tanggal 21 DEC 2004

BUPATI BANYUMAS




ARIS SETIONO



**DAFTAR NAMA DAN WILAYAH KERJA
 UNIT PENDIDIKAN KECAMATAN
 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

NO.	NAMA	WILAYAH KERJA
1.	Unit Pendidikan Kecamatan Ajibarang	Kecamatan Ajibarang
2.	Unit Pendidikan Kecamatan Banyumas	Kecamatan Banyumas
3.	Unit Pendidikan Kecamatan Baturaden	Kecamatan Baturaden
4.	Unit Pendidikan Kecamatan Cilongok	Kecamatan Cilongok
5.	Unit Pendidikan Kecamatan Gumelar	Kecamatan Gumelar
6.	Unit Pendidikan Kecamatan Jatilawang	Kecamatan Jatilawang
7.	Unit Pendidikan Kecamatan Kalibagor	Kecamatan Kalibagor
8.	Unit Pendidikan Kecamatan Karanglewas	Kecamatan Karanglewas
9.	Unit Pendidikan Kecamatan Kebasen	Kecamatan Kebasen
10.	Unit Pendidikan Kecamatan Kedungbanteng	Kecamatan Kedungbanteng
11.	Unit Pendidikan Kecamatan Kembaran	Kecamatan Kembaran
12.	Unit Pendidikan Kecamatan Kemranjen	Kecamatan Kemranjen
13.	Unit Pendidikan Kecamatan Lumbir	Kecamatan Lumbir
14.	Unit Pendidikan Kecamatan Patikraja	Kecamatan Patikraja
15.	Unit Pendidikan Kecamatan Pekuncen	Kecamatan Pekuncen
16.	Unit Pendidikan Kecamatan Purwojati	Kecamatan Purwojati
17.	Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Barat	Kecamatan Purwokerto Barat
18.	Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Selatan	Kecamatan Purwokerto Selatan
19.	Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Timur	Kecamatan Purwokerto Timur
20.	Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Utara	Kecamatan Purwokerto Utara
21.	Unit Pendidikan Kecamatan Rawalo	Kecamatan Rawalo
22.	Unit Pendidikan Kecamatan Sokaraja	Kecamatan Sokaraja
23.	Unit Pendidikan Kecamatan Somagede	Kecamatan Somagede
24.	Unit Pendidikan Kecamatan Sumbang	Kecamatan Sumbang
25.	Unit Pendidikan Kecamatan Sumpiuh	Kecamatan Sumpiuh
26.	Unit Pendidikan Kecamatan Tambak	Kecamatan Tambak
27.	Unit Pendidikan Kecamatan Wangon	Kecamatan Wangon


BUPATI BANYUMAS
ARIS SETIONO

